





www.ateia.co.id









INTERNATIONAL MEDIA.

Gelar Baksos, Tidar Setia '93 dan Yayasan ANV Indonesia Berikan Layanan Operasi Katarak Gratis Bagi Warga Magelang



MAGELANG (IM) - Bakti Akmil 1993 (Tidar Setia '93) bekerja sama dengan Yayasan A New Vision Indonesia (ANV Indonesia) menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis bagi warga di Magelang dan sekitarnya.

Baksos operasi katarak tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara (RST) dr Soedjono Magelang pada Jumat (18/8).

Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono yang hadir dan menyaksikan kegiatan sosial tersebut, mengapresiasi, alumni Akademi Militer (Akmil) angkatan 1993 yang telah menginisiasi operasi katarak bagi warga Magelang dan

sekitarnya.

"Banyak warga yang menderita katarak. Bahkan, sudah sekian lama tidak segera ditangani," ucapnya.

Menurutnya, hal itu jelas dapat merusak saraf mata dan kemungkinan kecil tidak bisa ditangani. Untuk itu, bakti sosial operasi katarak ini menjadi satu upaya agar membantu warga bisa melihat lagi tanpa adanya gangguan.

Kegiatan ini berlangsung pada 17-20 Agustus 2023. Apa-



Mayjen TNI Widi Prasetijono, Mayjen TNI A. Rizal Ramdhani dan Robert Njo berfoto bersama warga penerima manfaat operasi katarak.

bila operasi belum berhasil, akan

Ketua Tidar Setia 93 Mayjen

TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, kegiatan ini untuk memperingati 30 tahun



pengabdian terbentuknya alumni Akmil angkatan 1993. Sekaligus untuk merayakan HUT ke-78 RI.

"Kami menyelenggarakan baksos katarak dengan menggandeng Yayasan A New Vision Indonesia,"

> ujarnya. Sebetulnya, imbuhnya, ada lebih dari 1.000 warga yang menjalani screening. Hanya saja, yang memenuhi kriteria ada 512 orang.

> Pada Kamis (17/8), sudah ada 35 pasien yang melakukan operasi dan berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa dari mereka sudah bisa melihat dengan jelas.

Menurut Executive Director A New Vision Indonesia Elwi Jono, gangguan penyakit katarak tidak dapat dilihat secara kasat mata. Saat melakukan screening, warga diminta untuk membaca snellen chart.

Dia mengungkapkan, sebanyak 512 pasien penerima manfaat ini, sebagian besar mengidap katarak dengan kategori yang parah. Tidak sedikit pula dua matanya katarak. Sehingga mereka hanya bisa melihat dengan jarak pandang satu meter atau lebih parahnya hanya berupa bayangan.

Ketua Yayasan A New Vision (ANV) Indonesia Robert Njo menyebut, 80 persen orang yang menderita kebutaan di Indonesia disebabkan oleh katarak.

Setiap tahun, lanjutnya, jumlahnya selalu bertambah atau sekitar 275 ribu orang per tahun. Padahal, dokter spesialis mata di Indonesia hanya mampu melakukan operasi katarak sekitar 157 ribu orang. Sisanya belum ditangani secara maksimal. • kris



Mayjen TNI Widi Prasetijono meninjau pelayanan operasi katarak.







penerima manfaat operasi katarak.



kepada warga.

im dokter melayani warga untuk mendapatkan tindakan operasi katarak.

Dominasi Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Tol



CATATAN: Suprapti Widiasih, SE., MA (Dosen Institut STIAMI)

JALAN adalah salah satu public goods (barang Publik) dan merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat yang menjadi tugas negara untuk menyediakannya, baik jalan reguler maupun jalan tol.

Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dalam pembangunannya dominasi oleh pemerintah pusat atau negara menjadi sangat dominan. Walaupun demikian peran swasta dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena kemampuan negara terbatas.

Hal ini terungkap dalam sesi webinar rutin ANN ke 55 pada Se-

"Dominasi Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Tol" bersama nara sumber Dr. Budiman Widodo, M.Si (Universitas Surakarta), Dr. Tomi Setiawan (Universitas Padjajaran Bandung) dan penanggap oleh Ir. Sidiq Purnomo, MM (PT. Wika Tirta Jaya Jatiluhur).

lasa, 15 Agustus 2023 dengan tema

Dalam paparannya, Dr. Budiman Widodo Dosen dari UNSA menjelaskan makna dominasi berawal dari kata dan dimaknai sebagai domain pemerintah dimana mencakup 3 hal yaitu yang pertama formulasi atau perencanaan.

Kedua Implementasi atau pembangunannya dan Ketiga adalah Evaluasi Kebijakan. Dengan berdasarkan dari besaran jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dimana menurut data BPS jumlah penduduk Indonesia adalah 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 maka kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan dan sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal inilah yang membuat pembangunan jalan termasuk jalan tol meningkat dengan sangat cepat agar dapat mengimbangi mobilitas penduduk tersebut.

Pada era Presiden Joko Widodo ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 Km dengan skema komposisi pembangunan ialan tol di Indonesia masih didominasi oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat sebesar 41,3% ditambah BUMN sebesar 22.2% sedangkan sisanya digarap oleh Swasta yaitu 38,5%.

Pengembangan dari pembangunan infrastruktur jalan tol dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan daya saing global, dimana Indonesia memiliki indeks daya saing global yang masih rendah dan diharapkan dengan membaiknya infrastruktur jalan tol akan berkontribusi terhadap peningkatan indek tersebut.

Proses pembangunan jalan tol selama ini bersifat top-down dari pendanaan maupun perencanaannya sehingga pelibatan masyarakat sekitar tol jalan yang sangat terbatas membuat mereka tidak merasakan manfaat dari keberadaan jalan tol. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang telah melepaskan lahan pertaniannya untuk pembangunan sementara petani juga membutuhkan solusi jangka panjang.

Inilah yang menurut Budiman yang sering terkesampingkan adalah terkait evaluasi kebijakan dimana hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar jalan tol, pembangunan jalan tol kurangnya akses masyarakat terhadap usaha sehingga mereka tidak memiliki modal, memiliki ketrampilan yang rendah dan motivasi kewirausahan yang rendah.

Sementara narsum kedua, Dr. Tomi Setiawan, M.Si yang merupakan staf pengajar di departemen Administrasi Publik Unpad melihat pembangunan jalan tol dari sisi tata ruang dan menyoroti adanya disparitas negara berkembang.

Pembangunan infrastuktur akan meningkatkan keterkaitan yang simetris antar-wilayah dan mengurangi disparitas yaitu membentuk hubungan yang mutualisme antar wilayah, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas dan mengkonservasi sumber daya serta untuk meningkatkan lapangan kerja.

Dengan membandingkan pada Era kepemimpinan sebelumnya, SBY mempunyai MP3EI sebagai arahan pembangunan dengan target jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.600 Km, namun akhirnya gagal dan baru terwujud di Era Jokowi yang hingga Februari 2023 sudah hampir mencapai 1.600 km berdasarkan info dari

Tomi yang pernah belajar di Magister Perencanaan Wilayah mengatakan bahwa Indonesia belum mempunyai rancangan jalan tol yang detail untuk 25 tahun mendatang sehingga belum bisa diketahui berapa kebutuhan jalan

tol yang harus tersedia. Namun demikian pada pemerintahan Jokowi telah dilakukan dua kali perubahan pada UU tentang Jalan yang dimaksudkan agar pembangunan jalan tol lebih mudah

dilakukan. Ini menunjukkan keseriusan Jokowi untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur negara.

Yang menarik adalah walaupun sebagian besar kepemilikan jalan tol di Indonesia oleh swasta dengan konsesi bisa sampai 50 tahun tapi kepenguasaannya tetap oleh negara.

Dari paparan kedua Narsum tersebut ditanggapi oleh Sidiq Purnomo yang baru saja menjabat sebagai Dirut di PT. Wika Tirta Jaya Jatiluhur.

Sebelumnya Sidiq menjabat sebagai Direktur Teknik dan Produksi di PT. Wikajaya Karya Beton yang juga menangani pembangunan beberapa ruas jalan tol di Indonesia.

Sidiq menanggapi materi Budiman dengan mengatakan bahwa antisipasi warga terdampak sebenarnya juga terjadi di semua pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia seperti pembangunan menara sutet, air minum maupun bendungan.

Secara umum memang terlihat bahwa warga terdampak di sekitarnya tidak merasakan secara langsung pembangunan tersebut.

Dan jika dilihat secara kedaerahan tentu hal ini menimbulkan potensi masalah. Untuk itulah pemerintah ha-

rus hadir agar dapat membuat regulasi yang adil antara pengambil dan pemanfaat dan daerah yang wilayahnya diambil. Sidiq menyarankan adanya

penelitian yang lebih makro untuk memperlihatkan konektivitas yang lebih luas yang memperlihatkan kesejahteraan secara makro sehingga adanya perasaan berkorban dari para warga terdampak dapat diminimalisir.

Mengapa negara harus hadir dalam penyediaan infrastruktur jalan karena memang menjadi tugas negara.

Jika dilihat dari perbandingan dengan sektor lainnya maka di Indonesia masih kurang 4% dari PDB. Terkait kepemilikan jalan tol oleh BUMN inipun sebenarnya kurang menarik dan tidak semuanya bagus secara finansial.

Terkadang kurang menarik secara bisnis namun IRR bagus maka akan ditawarkan dulu kepada

Namun jika secara IRR kurang bagus maka akan dilibatkan BUMN untuk andil dalam pembangunannya. Hal inilah yang mendorong pembangunan jalan tol di Era Jokowi terlihat begitu masif.

Tentunya kebijakan ini juga terkait pilihan yang harus diambil pemerintah apakah mau maju atau

tertinggal. Sehingga jika dilihat dari salah benarnya tentu tidak ada yang mutlak benar atau salah 100%. ● ***



RABU 23 AGUSTUS 2023











Delegasi dan Pengusaha dari Shenzhen Bao'an District Kunjungi Perhimpunan INTI





JAKARTA (IM) - Delegasi dan Pengusaha dari Shenzhen Bao'an District, yang dipimpin oleh Mr. Wei Shugiang (Standing Member of Bao'an District Committee, Shenzhen), Senin (21/8) sore lalu melakukan kunjungan persahabatan ke Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa).

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua Perhimpunan INTI Robert Njo, Ketua Kehormatan Senior Efendy Choeng dan Ketua Pembina Kehormatan Muljawan Jahja beserta sejumlah pengusaha, di Sekretariat Perhimpunan INTI, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Robert Njo secara singkat memaparkan tentang Perhimpunan INTI, baik awal mula didirikan hingga kiprahnya dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia, baik melalui kegiatan sosial maupun ekonomi.

Sementara itu Standing Member of Bao'an District Committee, Shenzhen Mr. Wei Shugiang memaparkan tentang Shenzhen Bao'an District. • kris



Meriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Grand Indonesia BerbaGI dengan Veteran





JAKARTA (IM) - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Grand Indonesia menyelenggarakan program CSR BerbaGI dengan Veteran pada Rabu (16/8)

"Sebagai perusahaan yang selalu berkomitmen untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, kami merasa terpanggil untuk memberikan penghormatan dan dukungan kepada para Veteran yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keamanan Negara kita. Program ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan



terhadap pengorbanan yang telah mereka berikan", ungkap Annisa Hazarini selaku Assistant Ma-

nager Corporate Communications Grand Indonesia. Bekerjasama dengan Sahabat

Para Veteran diajak menikmati LED interaktif dan pertunjukan

keroncong dari Galeri Indonesia Kaya.

Veteran serta didukung oleh Galeri Indonesia Kaya dan Alun

Alun Indonesia, Grand Indonesia

mengundang sebanyak 30 Veteran untuk menikmati keseruan yang ada di Grand Indonesia.

Mulai dari menikmati LED interaktif dan pertunjukan keroncong persembahan dari Galeri Indonesia Kaya, menonton pertunjukan air mancur di Fountain Atrium, serta menikmati santap siang bersama di Waroeng Kopi Alun Alun Indonesia sembari berbagi kisah perjuangan yang mereka lakukan untuk negeri tercinta.

Acara ditutup dengan pembagian bingkisan menarik persembahan dari Grand Indonesia, goodie bag dari Galeri Indonesia Kaya, Alun Alun Indonesia dan Mustika Ratu. • bam

Perwakilan TITD se-Jatim Hadiri Perayaan 618 Tahun Kedatangan YM Kongco Sam Poo Tay Djien di Kelenteng Sam Poo Sing Bio Surabaya





SURABAYA (IM) - Perayaan 618 Tahun kedatangan YM Kongco Sam Poo Tay Djien di Kelenteng Sam Poo Sing Bio Surabaya atau Kelenteng Mbah Ratu, berlangsung meriah, Selasa (15/8) malam.

Kegiatan yang digelar sejak pukul 18.00 WIB tersebut, juga dihadiri perwakilan TITD (Tempat Ibadah Tri Darma) se-Jawa Timur.

Menurut Ketua Yayasan TITD Sam Poo Sing Bio Surabaya Hartadi Tanuwijaya, puncak acara adalah

upacara sembahyang bersama. "Kami berdoa dan berharap, agar umat Tridharma seluruh Indonesia tetap rukun, damai dan sejahtera. Serta bangsa dan negara



Indonesia lebih maju dan jaya. Dan pelaksanaan Pemilu 2024, bisa berjalan damai dan selamat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PTITD Komda Jatim Gunawan Putra Wirawan mengucapakan selamat atas perayaan 618 tahun kedatangan YM Kongco Sam Poo Tay Djien.

"Semoga Kelenteng Sam Poo Sing Bio Surabaya atau biasa disebut Klenteng Mbah Ratu ini, terus maju dan berjaya," harapnya.

Sepanjang acara dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan lagu-lagu elektone. Panitia acara juga menyediakan berbagai macam menu makanan Chinese yang lezat. ● anto tze